

ABSTRAK

Deskripsi Tentang Pemaknaan Pasal 17 Ayat 2 dan Pasal 37 Ayat 5 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
oleh
Muhamad Kafin Pranata
NIM: 22310088

Pemohon menilai Pasal 17 Ayat 2 dan Pasal 37 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945. Permasalahan adalah: Mengapa Mahkamah Konstitusi memaknai kembali pasal 17 ayat (2) dengan mengecualikan bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun dan tidak digunakan untuk kepentingan komersil? Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Mahkamah Konstitusi memaknai Kembali pasal 17 ayat (2) dengan mengecualikan bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun dan tidak digunakan untuk kepentingan komersil. Untuk mengetahui akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang berguna secara teori dan praktis. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi memaknai Kembali pasal 17 ayat (2) dengan mengecualikan bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun dan tidak digunakan untuk kepentingan komersil dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim Mahkamah Konstitusi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahan primer, bahan sekunder dan tersier yang akan dianalisa secara normatif kualitatif.

Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukan bahwa: *Pertama*, Alasan Mahkamah Konstitusi memaknai kembali pasal 17 ayat (2) dengan mengecualikan bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun dan tidak digunakan untuk kepentingan komersil adalah: 1). Ketidaksesuaian hak hidup turun-temurun masyarakat adat yang tidak mengakomodir hak masyarakat yang secara historis hidup dalam pemanfaatan hutan. 2). tumpang tindih dan ketidakjelasan hukum yang menimbulkan interpretasi yang beragam. 3). Pembatasan yang kaku dengan adanya syarat pembatasan minimal 5 tahun penguasaan dan maksimal 5 hektar dan tidak adil bagi masyarakat adat. 4). Proses pengukuhan kawasan hutan yang belum tuntas terkait penunjukan kawasan hutan dinilai masih administratif yang menimbulkan sengketa baru. *Kedua*, Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi adalah: 1).Memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat adat;2)Memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat tanpa harus menghadapi ancaman pidana karena izin; 3).Percepatan penataan Kawasan hutan; 4).Penegakan hukum dalam Undang Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 5).Penegasan perlindungan hukum atas perlindungan masyarakat adat. Dari kesimpulan tersebut diatas dapat di sarankan sebagai berikut: Bagi Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang Undang perlu meningkatkan kualitas putusan dengan penafsiran konstitusi yang komprehensif, memastikan tindak lanjut pencabutan pasal-pasal ketentuan Undang Undang yang dinyatakan inkonstitusional. Bagi masyarakat adat perlu tetap menjaga hutan adat yang hidup secara turun temurun dan tidak digunakan untuk kepentingan komersil.

Kata Kunci: *Masyarakat yang hidup secara turun temurun dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi*

ABSTRACT

Description of the Interpretation of Article 17 Paragraph 2 and Article 37 Paragraph 5 of Law Number 6 of 2023 concerning Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Becoming Law

by

Muhamad Kafin Pranata

NIM: 22310088

The Petitioner believes that Article 17 Paragraph 2 and Article 37 Paragraph 5 of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation are contrary to the 1945 Constitution. The problem is: Why did the Constitutional Court reinterpret Article 17 Paragraph (2) to exclude people who live hereditarily and are not used for commercial purposes? What are the legal consequences of the Constitutional Court's decision? The purpose of this study is: To determine the Constitutional Court's reinterpretation of Article 17 Paragraph (2) to exclude people who live hereditarily and are not used for commercial purposes. To determine the legal consequences of the Constitutional Court's decision, which are useful theoretically and practically. This research is a descriptive normative study. The independent variables in this study are: The Constitutional Court reinterpreted Article 17 paragraph (2) by excluding communities living in hereditary areas and not used for commercial purposes and the legal consequences of the Constitutional Court's decision. The dependent variable in this study is the decision of the Constitutional Court judges. The data obtained in this study are primary, secondary, and tertiary materials that will be analyzed qualitatively normatively.

Based on the research results, it shows that: First, the reasons for the Constitutional Court reinterpreting Article 17 paragraph (2) by excluding communities living in hereditary areas and not used for commercial purposes are: 1). Inconsistency with the right to life for generations of indigenous peoples that does not accommodate the rights of communities who have historically lived in forest utilization. 2). Overlapping and unclear laws that give rise to diverse interpretations. 3). Rigid restrictions with a minimum limitation of 5 years of control and a maximum of 5 hectares and are unfair to indigenous peoples. 4). The unfinished forest area confirmation process, related to the designation of forest areas, is considered to be administrative, giving rise to new disputes. Second, the legal consequences of the Constitutional Court's decision are: 1) Providing fair legal certainty for indigenous communities; 2) Providing legal protection for indigenous communities without having to face criminal threats due to permits; 3) Accelerating forest area management; 4) Law enforcement is regulated in Law No. 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. 5) Affirming legal protection for indigenous communities. Based on the above conclusions, the following recommendations can be made: The Constitutional Court, in reviewing laws, needs to improve the quality of its decisions with a comprehensive interpretation of the constitution and ensure follow-up action to revoke articles of the law declared unconstitutional. Indigenous communities need to maintain their customary forests, which have been passed down through generations and are not used for commercial purposes.

Keywords: Communities living in customary forests for generations and the Legal Consequences of the Constitutional Court's Decision